



Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemkot Singkawang dan DJPb Kalbar Teken MoU

Pemerintah Kota Singkawang menjalin kerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Keuangan terkait Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

HAL ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Wali Kota Singkawang dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat di Balairung, Jumat (25/3).

“Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan keuangan negara maupun daerah di Kalimantan Barat yang berjalan dengan baik,” kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro.

Disamping itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga kini masih mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kehadiran DJPb Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat menjadi wujud penguatan pengelolaan keuangan. MoU ini memungkinkan Pemda dan Kakanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data APBD dan data lainnya, seperti data potensi investasi di daerah,” ujarnya.

Data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada



SUARAPEMRED/RUDI

NOTA KESEPAKATAN - Penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan oleh Wali Kota Singkawang dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat di Balairung, Jumat (25/3).

Pemda melalui laporan Asset Liability Committee (ALCo) bulanan dan kajian fiscal regional.

Sementara Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyambut baik kerja sama pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dibangun oleh DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

“Kami selaku Pemerintah Kota Singkawang menyambut baik kesepakatan yang dibuat pada hari ini. Dengan adanya kerjasama ini, Pemkot Singkawang dapat memperoleh data dan informasi, seperti pagu dan realisasi tentang pendapatan dan belanja satuan kerja Kement-

erian atau Lembaga (K/L), pagu dan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pagu dan realisasi TKDD, serta pagu dan realisasi penyaluran dana BOS,” katanya.

Kemudian, Pemerintah Kota Singkawang bertanggungjawab untuk menyediakan data dan informasi melalui laporan realisasi anggaran dan laporan operasional triwulan, laporan keuangan pemerintah daerah tiap semester dan tahunan, laporan keuangan badan layanan umum daerah dan BUMD tiap semester dan tahunan, peraturan kepala daerah mengenai sistem akuntansi pemda, perda terkait pengelolaan APBD, serta data dan informasi terkait investasi daerah. (rudi)